

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DALAM ILMU EKONOMI**

**OLEH:**

**MUKHSALMINA**

**NIM: 22208011036**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER DALAM ILMU EKONOMI**

**Disusun Oleh:**

**MUKHSALMINA**

**NIM. 22208011036**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Sunaryati, S.E., M.Si**

**NIP. 197511112002122002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Mukhsalmina

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

Di-Yogyakarta

*Assalamu''alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mukhsalmina

NIM : 22208011036

Judul Tesis : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN, OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022

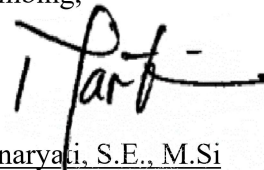
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Pembimbing,



Dr. Sunaryati, S.E., M.Si  
NIP. 197511112002122002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1799/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHSALMINA, S.E  
Nomor Induk Mahasiswa : 22208011036  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sunaryati, SE., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6760f5da7aad6



Penguji I

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6752d5ee115b



Penguji II

Dr. Ibnu Muhtir, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 674020d58a0f1



Yogyakarta, 23 Oktober 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.  
SIGNED

Valid ID: 67624a5478b56

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhsalmina

NIM : 22208011036

Jurusan Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan tesis yang berjudul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat atau sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dan disebutkan dalam karya ini, makanya tanggung jawab semuanya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Hormat saya,



Mukhsalmina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Saya yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Mukhsalmina  
NIM : 22208011036  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, karya ilmiah saya berjudul:

**“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022”.**

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup untuk menerbitkan tesis ke dalam jurnal yang bersitasi standar DOAJ (*Directory of open access journal*), guna memenuhi salah satu syarat Ujian Tugas Akhir/Tesis di program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Penulis



Mukhsalmina

## HALAMAN MOTTO

*Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan. Orang jahat memberimu pengalaman. Orang terburuk memberimu pelajaran. Dan orang terbaik memberimu kenangan.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ayahanda Drs. Muhammad Nur husin, M.M dan Ibunda Hartati, S.Pd, Sang motivator dan malaikat tak bersayap dalam hidup saya, yang penuh pengorbanan dan kesabaran serta tak pernah bosan untuk mendoakan dan kasih sayang mereka sampai saat ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Ṣa <sup>ʿ</sup>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa <sup>ʿ</sup>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʿ</sup>	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa <sup>ʿ</sup>	ṭ	Te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za''	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha''	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مَلْعَدَةٌ	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	„iddah

#### C. Ta' Marbuthah

Semua ta'' marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kataaslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّاهُ	Ditulis	„illah
كرمة الأَنْبياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
نَاعِل	Fathah	Ditulis	<i>Fa''ala</i>
ذَكَر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. Fathah + ya'' mati	Ditulis	<i>A</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. Kasrah + ya'' mati	Ditulis	<i>I</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فُرُود	Ditulis	<i>Furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya'' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
-----------------------	---------	-----------

بَيْنَاكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A''antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U''iddat</i>
لَيْتَن شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama''</i>
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH” sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Strata 2 Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc. selaku ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Joko Setyono, S.E., M.Si., selaku wakil Prodi Magister Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Dr. Sunaryati, S.E, M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.i., M.S.i., selaku dosen penasihat akademik selama 2 tahun di Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu atau wawasan serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Teruntuk Orang Tua, Bapak Drs. Muhammad Nur Husin, M.M dan Ibu Hartati, S.Pd, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, motivasi mendidik dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan arahan untuk menjadikan penulis orang yang bermanfaat.
10. Teruntuk Keluarga Besar Imum Husen, Bapak Ibran S.Ag dan Ibu Muhsinah S.Ag yang selalu support dalam hal apa pun. Teruntuk wa, Ibu nurbaini juga selalu mensupport dalam hal apapun.
11. Teruntuk keluarga Besar Ilyas Saleh, terutama untuk mi, Murniati yang selalu mendoakan penulis dan juga kepada; Yahdi, Cek Dan, Cek Kur, Cek pa dan Cek Din
12. Seluruh teman-teman Prodi Magister Ekonomi Syariah Angkatan 2022 terutama untuk Mes B yang selalu bersama dalam perkuliahan yang selalu menjadi teman terbaik penulis.
13. Kepada teman-teman WTTC Isbet, Amar, Sofwan, Aghistna, Rafika, Ica, dan teman diskusi Mela, Idin, Syafi Amy dan Dani yang selalu memberi dukungan dan menghibur penulis.
14. Teman-teman “INFEST” Prodi Ekonomi Syariah 2017 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis yaitu Nadia, Ade, Mamas dkk.
15. Kepada teman-teman Foskopda baik kakak-kakak maupun abang-abang dan adek-adek seperjuangan.
16. Teruntuk Nokman selaku kucing kesayangan penulis dan Surono selaku motor kesayangan penulis Teman- Teman kontak Abrar, Pijeh, Akrimy, Robby, Arik, Alief, Adoe, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
17. Terkhusus buat Mirza Fahlevi yang sangat banyak membantu penulis baik dalam pengambilan data ulang dan banyak hal lainnya.

18. Kepada seluruh pribadi inspiratif yang telah membantu penulis dalam proses Tesis ini dan tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun dengan kerendahan hati penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Penulis,



**Mukhsalmina**  
**NIM. 22208011036**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	10
D. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. <i>Stakeholder Theory</i> .....	13
B. Desentralisasi.....	13
C. Penerimaan Pajak Daerah .....	15
D. Dana perimbangan .....	19
E. Dana otonomi khusus .....	23
1. Pengertian Dana Otonomi Khusus.....	23
2. Daerah Yang diberi Otonomi Khusus.....	25
3. Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus .....	25

4. Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh .....	26
F. Kemiskinan.....	26
1. Kemiskinan Daerah dalam Islam .....	28
G. Rasio kemandirian keuangan daerah .....	33
H. Telaah Pustaka .....	36
I. Pengembangan Hipotesis .....	41
J. Kerangka Pemikiran.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis penelitian.....	49
B. Populasi dan pengambil Sampel .....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Definisi Operasional Variabel .....	50
E. Metode Analisis Data .....	53
F. Model Estimasi Regresi Data Panel .....	54
1. Common Effect model.....	54
2. Fixed Effect Model .....	55
3. Random Effect model .....	55
G. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .....	56
1. Uji Chow.....	56
2. Uji Hausman .....	57
3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	58
H. Uji Asumsi Klasik.....	59
1. Uji Multikolinearitas.....	59
2. Uji Multikolinearitas.....	60
I. Uji Hipotesis.....	60
1. Uji F .....	60
2. Uji t .....	61
3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Deskripsi Objek penelitian .....	65
B. Analisis Data Penelitian .....	68
1. Statistik Deskriptif .....	68

C. Analisis Hasil Uji Hipotesis .....	71
1. Hasil Estimasi Model .....	71
2. Uji Spesifikasi Model .....	72
3. Uji Asumsi Klasik .....	74
4. Hasil Uji Hipotesis .....	76
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	79
1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap kemandirian Keuangan Daerah .....	79
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah .....	81
3. Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah .....	83
4. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah .....	34
Tabel 4. 1 Nama Ibukota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh..	66
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Model .....	71
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow .....	72
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hausman .....	73
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas .....	74
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokolerasi .....	75
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	75
Tabel 4. 9 Hasil Uji F-Simultan .....	76
Tabel 4. 10 Uji t-Statistik .....	77
Tabel 4. 11 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio kemandirian fiskal 2014-2017.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	48
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Aceh .....	68



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 .....	7
--	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Data Asli Dari Bpka (Badan Pengelola Keuangan Aceh) .....	101
Lampiran. 2 Data Ln (PPD, DP Dan OTSUS).....	108
Lampiran. 3 Hasil Fem.....	113
Lampiran. 4 Rem.....	114
Lampiran. 5 Cem.....	115
Lampiran. 6 Uji Chow.....	115
Lampiran. 7 Uji Hausman.....	116
Lampiran. 8 Uji LM.....	116
Lampiran. 9 Uji Multikolinieritas .....	116
Lampiran. 10 Uji Heteroskedastisitas .....	117
Lampiran. 11 Hasil Uji Hipotesis .....	118
Lampiran 12 Curriculum Vitae .....	119



## ABSTRAK

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatan secara mandiri untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Adanya ketergantungan pada dana transfer dari pusat, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan optimalisasi penggunaan dana otonomi khusus menjadi perhatian utama dalam analisis kemandirian fiskal. Penelitian ini menganalisis pengaruh Penerimaan pajak daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah, dana otonomi khusus dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, hanya dana perimbangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat serta tingginya tingkat kemiskinan di Aceh menghambat upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pajak daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan melalui strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan program pengentasan kemiskinan yang efektif.

**Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan, Kemandirian Fiskal**

## **ABSTRACT**

*In the context of fiscal decentralization, regional governments are expected to be able to manage revenues independently to finance development and public services. The existence of dependence on transfer funds from the center, high levels of poverty, and optimizing the use of special autonomy funds are the main concerns in the analysis of fiscal independence. This research analyzes the influence of regional tax revenues, balancing funds, special autonomy funds, and poverty levels on regional financial independence in Aceh Province during the 2018-2022 period. The research results show that regional tax revenues, special autonomy funds and poverty do not have a significant influence on regional financial independence. On the other hand, only balancing funds have a significant negative influence on regional financial independence. This shows that dependence on balancing funds from the central government and the high level of poverty in Aceh hinder efforts to increase financial independence. Therefore, efforts are needed to increase local taxes and reduce dependence on balancing funds through better financial management strategies and effective poverty alleviation programs.*

**Keywords:** *Regional Tax Revenue, Balancing Fund, Special Autonomy Fund, Poverty, Fiscal Independence*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

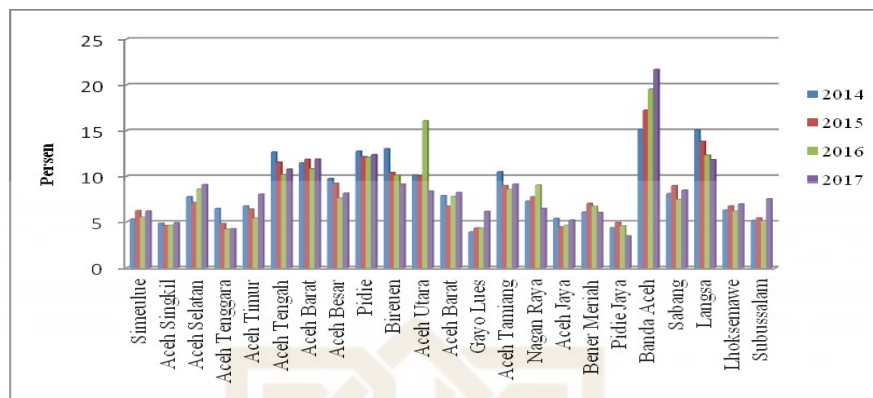
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Di Provinsi Aceh, kemandirian keuangan daerah menjadi isu yang krusial, terutama mengingat potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah. Namun, meskipun memiliki potensi tersebut, kemandirian keuangan daerah di Aceh masih tergolong rendah (Syam & Zulfikar, 2022).

Kemandirian keuangan daerah merefleksikan kemampuan pemerintah daerah untuk secara mandiri mendanai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Indikator utama kemandirian keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, termasuk transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman (Abu Bakar & Said, 2021).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah, karena pemerintah pusat menyadari bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi setempat, termasuk masalah yang dihadapi dan potensi sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan (Ulfah., 2020). Berikut data Kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



**Gambar 1. 1 Rasio kemandirian fiskal 2014-2017**

Sumber: Data BPS diolah (2023)

Gambar di atas menunjukkan tingkat kemandirian fiskal di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh setiap tahunnya. Pada tahun 2017, hanya Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat kemandirian di atas 20%, sementara Kabupaten Pidie Jaya memiliki tingkat kemandirian keuangan terendah sebesar 3,51%. Kemandirian fiskal yang rendah di Kabupaten/Kota Aceh menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan di Aceh masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal di Aceh belum sepenuhnya tercapai.

Diketahui Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah. Sebagai salah satu provinsi dengan PAD tertinggi urutan ke 5 di Sumatera namun untuk kemandirian keuangan daerah sendiri masih dalam kategori lemah (Afni & Nasir, 2021). Hal ini disebabkan karena daerah-daerah yang ada di provinsi aceh belum sepenuhnya mampu menggali potensi daerah masing-masing sebagai sumber penerimaan daerah

sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah (Amelia & Suparno, 2021).

(Sunarto & Sunyoto, 2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian daerah sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah meningkat, jumlah dana yang masuk ke kas daerah pun bertambah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian di wilayahnya. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi berarti kabupaten atau kota tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar, khususnya pemerintah pusat. Intervensi pemerintah pusat cenderung lebih rendah ketika kemandirian daerah tinggi. Sebaliknya, jika kemandirian rendah, intervensi dari pemerintah pusat akan semakin meningkat. Daerah yang mandiri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah. Tingginya pajak dan retribusi daerah menunjukkan semakin besarnya dana yang masuk ke kas daerah, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk mendorong perkembangan ekonomi daerahnya (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi berarti kabupaten atau kota tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar, yaitu pemerintah pusat (Feni & Faris, 2019).

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pendapatan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan melalui dana perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana perimbangan untuk setiap daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut (Ardiansyah, 2023) dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk mengatasi kesenjangan pendanaan antar daerah.

Pemberian dana perimbangan tersebut tidak kekal pemberiannya, melainkan hanya sementara selama suatu daerah belum dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah tidak menggantungkan sumber keuangan daerah melalui dana perimbangan tersebut, sebaliknya dapat mengatur strategi agar Penerimaan Asli Daerah dapat ditingkatkan supaya kemandirian daerah dapat tercapai, suatu daerah dinyatakan memiliki kemandirian dilihat dari tingginya rasio PAD.

Tingginya tingkat kontribusi dana perimbangan tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi pada daerah Aceh terhadap pengalokasian dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi tersebut akan membuat rusaknya roda pemerintahan Aceh dan proses

pembangunan daerah Aceh apabila pemberian dana perimbangan ini dihentikan, oleh karena itu pemerintah Aceh harus membuat perencanaan yang tepat terhadap proses pembangunan di masa yang akan datang untuk kemandirian daerah setempat apabila dana perimbangan ini dihentikan.

Rata-rata, bagian Indonesia dari pendapatan daerah melalui dana perimbangan mencapai 80 persen. Jika realisasi pengeluaran lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit di daerah. Oleh karena itu menutup kekurangan daerah belanja, kontribusi negara dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah di dalam kabupaten kota (Andirfa, 2016).

Pemberian dana otonomi khusus diberikan kepada provinsi aceh sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang dana otonomi khusus. Perbelakuan dana otonomi khusus ditujukan untuk menghargai kesenjangan dengan pembiayaan program-program otonomi agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Aceh.

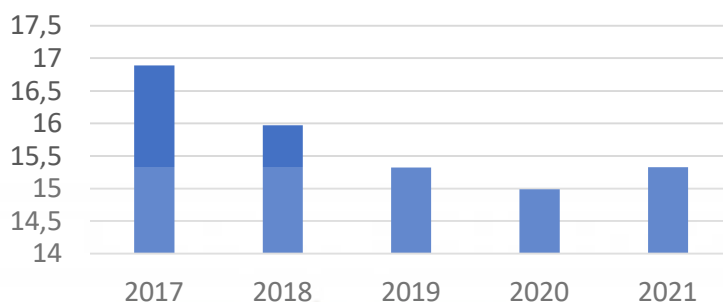
Penerapan otonomi khusus telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih desentralisasi. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah telah memfasilitasi proses ini, dengan pemerintah pusat menyalurkan Dana Perimbangan untuk mendukung pembangunan di daerah. Dana transfer ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan publik yang layak dan mengurangi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin (Maulana, 2018).

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat Aceh menerima dana yang melimpah dari pusat tetapi masih belum mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya, menunjukkan bahwa Aceh belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Oleh karena itu, kemandirian daerah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan di Provinsi Aceh agar pengelolaan desentralisasi fiskal dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Machfud, 2020).

Dana Otonomi Khusus Aceh seharusnya dapat membantu mengatasi kemiskinan pasca konflik bersenjata dan sosial yang berkepanjangan, namun kenyataannya hanya memberikan dampak sepihak bagi masyarakat Aceh. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 834,24 ribu orang, atau sekitar 15,33% dari total populasi. Angka ini meningkat sebesar 0,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, data tahunan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh sempat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir (BPK RI, 2023).

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Aceh. Mengingat Aceh adalah salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi dari tahun ke tahun dan merupakan provinsi yang memiliki tingkat persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatra. Saat ini, Provinsi Aceh berada di peringkat ke 6 dengan persentase kemiskinan tertinggi secara nasional selama 3 tahun berturut-turut (BPK RI, 2022).



**Grafik 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017-2021**

Sumber: Data BPS diolah (2023)

Persentase penduduk miskin di Aceh pada tahun 2017 adalah 16,83%. Angka ini terus menurun hingga mencapai 14,99% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, persentase tersebut kembali meningkat sebesar 0,34% menjadi 15,33%. Meskipun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan di Aceh masih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatra. Hal ini dapat dilihat pada diagram berikut. (BPS, 2023).

Pemerintah pusat mengimplementasikan Otonomi Khusus di Aceh sebagai bentuk respons terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat Aceh untuk pembangunan daerah. Pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh didasari oleh berbagai faktor, termasuk peran Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (Sanur, 2020).

Dana Otonomi Khusus dianggap efektif dalam mengurangi kemiskinan jika didukung oleh peraturan pemerintah yang memadai. DOKA berfungsi untuk meningkatkan pemerataan sosial dan ekonomi, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan informasi dan penanganan masalah dapat berlangsung

lebih cepat (Ikbal Ramzani et al., 2020). Ini berjalan beriringan dengan studi (Nisa Maulani et al., 2023) menunjukkan DOKA dapat mendukung operasi berdampak signifikan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, Peningkatan IPM melalui investasi dan belanja daerah.

Penelitian keuangan yang dikaji oleh Rahmat (2023) menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum baik. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum baik karena kriteria cukup. Rasio ketergantungan daerah menunjukkan kriteria sangat baik, sedangkan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria rendah. Sodikin (2021) juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih belum optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuannya untuk membiayai sendiri, efektivitas, dan efisiensi dalam mengelola keuangannya. Krisniawati et al (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil perhitungan rasio, memenuhi kriteria sebagai daerah yang belum mandiri, belum efektif, tetapi sudah efisien. Almira (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh meningkat setelah otonomi daerah, tetapi masih belum stabil dalam hal kemampuan pembiayaan dan efektivitas. Pemerintah Aceh menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dalam hal penerimaan pajak daerah.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi rasio kemandirian keuangan daerah, antara lain Penerimaan pajak Daerah, dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus (DOK),

dan tingkat kemiskinan (Budianto, 2016; Ajani et al., 2016; Rahmat Saleh, 2020); heryanti, 2019; Wahyu & Dewi, 2020; Nuraeni Handayani, 2022). Namun, masih ada penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda di mana Penerimaan pajak daerah, dana perimbangan, dan DOK tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah (Nufus, 2017; R. Neneng & Wahid, 2018; Nurhasanah, 2017; Erawati, 2015 Nurhayati, 2023; Verawaty, 2020 Nugraha 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perdebatan di antara para peneliti mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap rasio kemandirian daerah. Perdebatan ini memotivasi penulis untuk mengkajinya kembali di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan studi mengenai Kemandirian keuangan Daerah, yang merupakan inovasi penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian Daerah Aceh?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian Daerah Aceh?

3. Bagaimana pengaruh dana Otonomi Khusus terhadap kemandirian Daerah Aceh?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kemandirian Daerah Aceh?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian daerah Aceh.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian daerah Aceh.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemandirian daerah Aceh.
- d. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kemandirian daerah Aceh.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Akademisi

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai pengalokasian dan perkembangan di bidang otonomi khusus.

b. Manfaat praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman untuk kebijakan baru dalam pengembangan penggunaan Dana Otonomi Khusus, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik melalui penetapan kebijakan dan berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

**D. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pengantar yang menjelaskan dasar-dasar penentuan judul. Di dalam bab ini, terdapat latar belakang masalah, pembahasan fenomena yang relevan dengan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur penulisan.

Bab kedua mencakup kerangka teori dan kerangka acuan penelitian yang didasarkan pada kajian pustaka, referensi, dan publikasi penelitian sebelumnya yang relevan dengan penggunaan Dana Otonomi Khusus. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan hipotesis sebagai asumsi sementara dan kerangka berpikir untuk menjelaskan variabel yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan proses pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini, terdapat gambaran mengenai metode penelitian, termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

Bab keempat menyajikan gambaran umum mengenai topik penelitian dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, serta implikasinya. Bab ini berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, hasil penelitian, dan saran untuk berbagai pemangku kepentingan yang relevan bagi peneliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil estimasi analisis penelitian yang dilakukan dan interpretasi dari pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya masih tingginya tingkat pendapatan yang bergantung pada transfer dana, pemerintah pusat, menyebabkan kemandirian keuangan daerah menjadi rendah, karena kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan mereka sendiri secara mandiri masih terbatas.
2. Dana Perimbangan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya semakin rendah tingkat ketergantungan daerah pada dana perimbangan mengindikasikan tinggi kapasitas fiskal daerah, yang kemudian berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Dana Otonomi Khusus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya Dana Otonomi Khusus (Otsus), meskipun besar, cenderung membuat daerah lebih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dari pada memaksimalkan potensi pendapatan asli mereka sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Selanjutnya, variabel Kemiskinan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh. Artinya tingkat kemiskinan yang tinggi berdampak pada meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran untuk pemerintah Provinsi Aceh dan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Otonomi Khusus, dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang efektif dan program-program yang memotivasi masyarakat untuk membayar pajak secara penuh. Pajak daerah merupakan komponen utama dari PAD, dan meningkatkan pajak dapat signifikan meningkatkan PAD. Selanjutnya pemerintah Provinsi Aceh harus memanfaatkan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dengan lebih efektif. Serta program pengentasan kemiskinan harus dijadikan sebagai program unggulan di dalam kebijakan pemerintah.
2. Penelitian Selanjutnya: Penelitian harus melibatkan data yang lebih luas dan beragam, serta menggunakan analisis yang lebih canggih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, & Darus Altin. (2023). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Bisnis Dharma Andalas*, 25(1).
- Abu Bakar, & Sastra Widiyanti Said. (2021). Analisis tingkat kemandirian, efektivitas dan kemampuan keuangan daerah kabupaten mimika. *JURNAL KRITIS*, 5(2), 1–20.
- Adissya Mega Christia, & Budi Ispriyarso. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Afni Riskiyan, & Muhammad Nasir. (2021). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)* , 6(3).
- Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 101–120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719>
- Alla Asmara, & Stannia Cahaya Suci. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1).
- Almira Keumala Ulfah, Dedy Fernanda, Sisca Mediyanti, Agustina, & Josi Farmiati. (2020). Tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah pemerintah provinsi aceh setelah revisi uu otonomi daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 7(3), 539–544. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Alwin Teniro, Edi Kurniawan, & Husni Fachri. (2023). Intensitas pengelolaan keuangan daerah dan reralisasi anggaran pendapatan belanja kabupaten sebagai rasio. *Biram Samtani Sains*, 7(2), 1–9. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jbss>
- Amelia Soviana, & Suparno. (2021). Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 242–249.
- Ana Kurnia Maulida, Lucia Rita Indrawati, & Panji Kusuma Prasetyanto. (2019). Analysis of the determination of economic growth in the asean region for the period 2007-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1).
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi

- Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.708>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Ayler Beniah Ndraha, & Dedy Pribadi Uang. (2018). Strategi pengalokasian dana alokasi umum dalam urusan otonomi daerah di kabupaten nganjuk provinsi jawa timur. *JE & KP*, 5(2), 129–143.
- BPK RI. (2019). *Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan*.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851.
- Budianto, & Stanly W Alexander. (2016). Pengaruh pad dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, & Bambang Suryono. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur. *Bambang Suryono*, 8(8).
- Debora Sanur L. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di aceh. *Jurnal Politica*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Digdowiseiso, K., Rahardian, T., & Hartami, L. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Empat Provinsi Otonomi Khusus Periode 2013-2021. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2374–2400. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i4.3460>
- Edward. (2017). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1).
- Eka Sintala Dewi Ajani, Akram, & Lilik Handajani. (2016). Hubungan pad, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah di nusa tenggara barat. *Jurnal Ekonomi Universitas Mataram*, 21–39.
- Erawati, N. T. L. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*, Vol.2, No.(23).

- Fahriansyah Syam, & Ahmad Zulfikar. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Feni Febriyanti, & Muhammad Faris. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap kemandirian keuangan daerah Pada pemerintah kabupaten/kota Di provinsi jawa timur tahun 2015-2017. *Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Ghani, J. A., Grewal, B., Ahmed, A. D., & Nor, N. M. (2019). Fiscal decentralisation and economic growth in Malaysia: A Market preserving federalism perspective. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 53(1), 153–170. <https://doi.org/10.17576/JEM-2019-5301-13>
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>
- Hairiyah Lewi, Malisan Zaki, & Fakhroni. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Available Online: Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/KINERJA*, 14(2), 85–91.
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. 204 *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES*.
- Hayatun Nufus, & Jhon Andra Asmara. (2017). Pengaruh pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otonomi khusus sebagai pemoderasi pada kab/kota di provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Hilda Zilviana Sodikin, & Medi Nopiana. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah provinsi aceh. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 421–433. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.4343>
- Iqbal Ramzani, Muhammad Yasir Yusuf, & Hafas Furqan. (2020). Model pengelolaan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di aceh (ditinjau dari maqashid syariah). *Journal of Sharia Economics*, 01(01), 59–81.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND*

- (*Jurnal Manajemen Indonesia*), 5(1), 1. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>
- Jefrie Maulana, Eddy Purnama, & Mahdi Syabandir. (2018). Perimbangan dana otonomi khusus aceh antara provinsi dan kabupaten/kota consideration of aceh spesial autonomy fund of between province and district/city. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 18–38.
- Jorge Martinez-Vazquez, & Robert M. McNab. (2001). Fiscal decentralization and economic growth. *Andrew Young School of Policy Studies*, 1–40. <http://isp-aysps.gsu.edu>
- Jumadi, M. Pudjiharjo, Ghazali, M., & Moh. Khusaini. (2013). The impact of fiscal decentralization on local economic development in east java. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 13(1), 1–7. [www.Iosrjournals.Org](http://www.Iosrjournals.Org)
- Konstantinus Pati Sanga, Suwardi Bambang Hermanto, & Nur Handayani. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Konferensi Regional Akuntansi*. <https://www.researchgate.net/publication/327160391>
- Krest D Tolosang. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03).
- Krisniawati, Muhammad Zulkarnain, & Yuliana. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten aceh timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>
- Krisniawati, Zulkarnain, M., & Yuliana. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1–13.
- Laterina Putri, & Yuan. (2021). Pendapatan asli daerah: apakah pajak daerah berkontribusi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(3), 1.
- Listya Nindita, N., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi jawa barat. *Journal Accounting and Finance Edisi*, 2(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- M. Shabri Abd. Majid. (2018). Mengentaskan kemiskinan rakyat aceh dengan syari'ah. *Media Syariah*, xv(2), 215–225.

- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota provinsi aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia(j-Mind)*, 5(1), 14.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Maria Ekowati. (2021). Pemanfaatan dana otonomi khusus dalam mendukung kinerja pemerintah di provinsi aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 2(1), 21–45.
- Muhammad Azizi. (2018). Dampak dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap ketimpangan produk domestik regional bruto di provinsi Sulawesi selatan periode 2006-2014. *Journal Economic and Business Of Islam*, 2(1), 113–135.
- Mulia Andirfa, Hasan Basri, & M.Shabri A.Majid. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di provinsi aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Najam Fush shilat, Feri Andreansyah, & Luthvia Aziza Firdaus. (2024). Kemiskinan Dalam Islam : Faktor Penyebab Dan Solusinya. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 162–174. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.167>
- Nanda Herijal Putra, & Amran. (2023). Dinamika tata kelola dana otonomi khusus di aceh the dynamics of special autonomy funds governance in aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(02), 192–213.
- Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192–206.
- Neng Kamarni, Chris Yohanes Ginting, & Maulini Septya. (2022). Dampak dana otonomi khusus dan dana perimbangan terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening

- pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi aceh tahun 2013-2017. *Menara Ilmu* , *XVI*(01).
- Nisa Maulani, A., Wahyudin, A., Ekonomika dan Bisnis, F., & Negeri Semarang Permalink, U. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja publik terhadap kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia (ipm) sebagai variabel moderasi di jawa tengah. *Business and Economic Analysis Journal*, *3*(2), 65–74. <https://doi.org/10.15294/beaj.v3i2.46387>
- Nugraha, & Tia Amelia. (2017). Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di jawa barat tahun 2011-2014. *Jurnal Wacana Kinerja* , *20*(1).
- Nur, A., & Fauzia, I. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemiskinan Dan Peranan Hukum Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(18), 102–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13864691>
- Nuraeni Handayani. (2022). Pengaruh ipm, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2017-2019. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, *11*(1), 26–36.
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, *1*(1), 60–73. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Nurhayati, Sri Yani Kusumastuti, Nur Hidayatullah, & Suparyati, A. (2023). Determinasi tingkat kemandirian fiskal 62 kabupaten tertinggal di indonesia. *Media Ekonomi*, *30*(2), 104–112. <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.14986>
- Nyoman Trisna Erawati, & Leny Suzan. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota bandung (studi kasus pada dpkad kota bandung periode 2009-2013). *E-Proceeding of Managemen*, *2*(3), 3260–3266.
- Prasasti, R., & Musthofa, M. W. (2023). Dampak Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Kacamata Ekonomi Islam (Periode 2018-2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3762. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10707>
- Prasetya, F. (2012). *Modul ekonomi publik: bagian vii teori fiskal federalisme*. Malang: fakultas ekonomi dan bisnis unibraw (Prasetya, Ed.). Bagian VII Teori Fiskal Federalisme.

- Prayudi. (2016). Analisis atas kemandirian pemda dalam mengelola keuangannya. *PKN STAN*, 105–118.
- Putra, I., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i3.3583>
- Putra, N. H., & Amran, A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(2), 192–213. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819>
- R. Neneng Rina Andriani, & Nisa Noor Wahid. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Rahayu, W., Syamsu Diyar, A., & Priyatmo, T. (2024). PENGARUH PAJAK DAERAH, DBH, DAN DAK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMDA DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* —, 5, 38–56. <https://jmp.kemenkeu.go.id>
- Rahmat Arfan, Geta Ambartiasari, Indra Akbar, & Nurvira Nanda. (2023). Analisis rasio pendapatan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada kota banda Aceh tahun 2017- 2020. *JURNAL ECONOMINA*, 2(4), 980–992.
- Rahmat Saleh. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Rinaldi Syahputra. (2017). Analisis derajat desentralisasi atau kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di aceh tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.
- Riskiyani, A., & Nasir, M. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi ...*, 6(3), 173–182.
- Riswati. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pad di kabupaten bandung. *JEKP ( Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik )*, 9, 12–22.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 20(1), 105–123.

- Riyans Ardiansyah. (2023). *Determinan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah*. 4 No. 1 Tahun 2023.
- Rizal, Moch., & Harsono, M. (2022). Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 1, 116–136.
- Rizka Putri Pranandari, Kaharuddin, & Muhammad Ghafur Wibowo. (2022). Pengaruh indeks risiko bencana, pdrb dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah berdominasi perkotaan di provinsi jawa barat periode 2017-2020. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5, 14–4.
- Rosyafah Febiandani, & Deky Aji Suseno. (2016). Analisis hubungan kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan daerah Terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 217–225. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Santria, G., & Nawarti, B. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Dumai. *Jurnal Ekonomi KIAT2*, 34(1), 1–10.
- Saputri, J., & Ichsan, I. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(3), 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v5i3.10480>
- Sodikin, H. Z., & Nopiana, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh. *YUME: Journal of Management*, 4(3), 421–433. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.4343>
- Sopian, R., & Handoyo, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Neraca Manajemen Ekonomi*, 7(5).
- Suharyo. (2016). Otonomi khusus di papua dan aceh sebagai perwujudan implementasi peranan hukum dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, 5(3), 323–337.
- Sunarto, & Sunyoto. (2016). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemadirian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah*.
- Suryana. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>

- Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2015). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 35–49.
- Tri Santoso, R., Syukri, M., Ayu Putri Ermawati, D., & Hasanah, matul. (2021). Analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–93. <https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx>
- Tuah, S. N. (2022). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Dampak dari Penerapan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 316–322.
- Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, & Nurhidayah. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 2655–8262.
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Mbia*, 16(1), 1–10.
- Wahyu Mauludin, & Retno Mustika Dewi. (2020). Rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi banten. *JUPE*, 08(03), 116–121.
- Wahyudin Noor. (2017). Mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia di madrasah. *TARBAWI*, 3(02), 153–167.
- Wau, T., & Fau, J. F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabpaten Nias Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Nias Selatan*, 1(1), 83–100.
- Wike Nurliza Arpani, & Halmawati. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390.
- Wiley. (2017). *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis: pendekatan pengembangan keahlian*. Salemba Empat.
- world bank. (2001). *Decentralization and governance: does decentralization improve public service delivery? In World Bank*.

Zaki 'ulya. (2014). *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh.*

